

BAB II

OBJEK PENELITIAN

2.1 Letak Geografis Kabupaten Sukoharjo dan Pembagian Wilayah Kabupaten Sukoharjo

2.1.1 Letak Geografis Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki Luas 46.666 hektar atau 1,43 persen luas Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Sukoharjo terletak pada 1100 57' 33,70" - 1100 42' 6,79" BT dan 70 32' 17.00" - 70 49' 32.00" LS. Kabupaten Sukoharjo berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan lima kabupaten/kota di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Boyolali dan Kota Surakarta, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
2. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri
4. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

2.1.2 Pembagian Wilayah Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo Memiliki 12 Kecamatan yaitu, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bulu, Kecamatan

Tawangasari dan Kecamatan Weru. Sebagai rincian luas kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

Tabel 2. 1: Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

NO	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Kecamatan Weru	4.198 Ha
2.	Kecamatan Bulu	4.386 Ha
3.	Kecamatan Tawangasari	3.998 Ha
4.	Kecamatan Sukoharjo	4.458 Ha
5.	Kecamatan Nguter	5.88 Ha
6.	Kecamatan Bendosari	5.299 Ha
7.	Kecamatan Polokarto	6.218 Ha
8.	Kecamatan Mojolaban	6.554 Ha
9.	Kecamatan Grogol	3.000 Ha
10.	Kecamatan Baki	2.197 Ha
11.	Kecamatan Gatak	1.947 Ha
12.	Kecamatan Kartasura	1.923 Ha

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo 2020

Kabupaten Sukoharjo terbagi dalam 12 Kecamatan, 150 Desa dan 17 Kelurahan, 463 Dukuh, 1.473 Rukun Warga (RW) dan 4.684 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Polokarto merupakan Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 17 desa dan Kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah Kecamatan Bulu jumlah desa sebanyak 12 desa., Kecamatan Tawangasari jumlah desa sebanyak 12 desa dan Kecamatan Kartasura jumlah desa sebanyak 10 desa.

Tabel 2.2 : Pembagian Wilayah Administrasi Kab. Sukoharjo

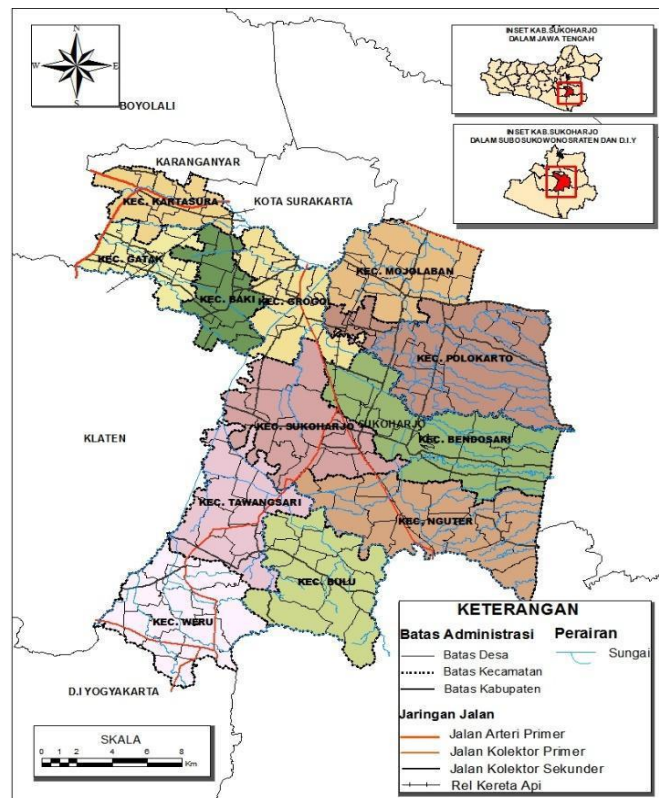
NO	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	RT	RW
1.	Weru	13	0	47	398	137
2.	Bulu	12	0	41	245	102
3.	Tawangasari	12	0	38	320	115
4.	Sukoharjo	0	14	0	449	141
5.	Nguter	16	0	55	352	122
6.	Bendosari	13	1	43	320	110
7.	Polokarto	17	0	52	372	124
8.	Mojolaban	15	0	52	537	160

9.	Grogol	14	0	39	639	145
10.	Baki	14	0	35	360	110
11.	Gatak	14	0	32	262	92
12.	Kartasura	10	12	29	430	115
	Jumlah Total	150	27	463	4684	1473

Sumber: Sukoharjo Dalam Angka, 2020

Dalam penjabaran kewilayahan, Kabupaten Sukoharjo hanya memiliki 3 Kecamatan yang memiliki Kelurahan dalam pembagian wilayah, antara lain Kecamatan Sukoharjo memiliki jumlah 14 kelurahan, Kecamatan Bendosari memiliki jumlah 1 kelurahan dan Kecamatan Kartasura memiliki 12 kelurahan. Selain dari 3 kecamatan tersebut, kecamatan – kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo tidak memiliki Kelurahan sama sekali di dalam pembagian kewilayahan.

Gambar 2.1.: Peta Kabupaten Sukoharjo



Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Sukoharjo

2.2 Sejarah ASN di Kabupaten Sukoharjo

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang memiliki peran dalam berjalannya suatu pemerintahan. Dalam sejarahnya, ASN di Kabupaten Sukoharjo memiliki sejarah yang panjang terutama dalam menjalankan tugas di pemerintahan. Pada Era Kolonial Belanda, wilayah Sukoharjo termasuk dalam struktur administratif di bawah kontrol kolonial. Pegawai pemerintahan pada masa itu terdiri dari pegawai pribumi yang disebut priyayi, yang sebagian besar bekerja untuk kepentingan administrasi Belanda. Mereka bertugas melaksanakan kebijakan kolonial di tingkat lokal. Meski belum dikenal istilah ASN, keberadaan mereka dapat dianggap sebagai cikal bakal birokrasi modern di Sukoharjo.

Pada Masa Kemerdekaan sekitar tahun 1945–1950-an, Sukoharjo resmi menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Pegawai pemerintah di Sukoharjo saat itu ditransisikan dari sistem kolonial ke sistem nasional. Namun, pada masa awal kemerdekaan, birokrasi sering diwarnai oleh dinamika politik dan konflik, termasuk masa revolusi fisik melawan Belanda. Pada 1946, Sukoharjo sempat menjadi wilayah yang strategis karena dekat dengan Yogyakarta, ibu kota sementara Republik Indonesia. Pegawai pemerintah lokal berperan dalam mendukung perjuangan kemerdekaan sekaligus membangun pemerintahan daerah.

Hal ini berlanjut pada Masa Orde Lama sekitar tahun 1950 – 1965, yang dimana terdapat dinamika yang sangat intens yang dirasakan birokrasi pada saat itu. Hal ini terjadi karena sistem pemerintahan pada saat itu beberapa kali berganti karena keputusan dan kebijakan Pemerintahan Pusat. Hal ini menjadikan Pegawai

Negeri mendapatkan intervensi politik yang kuat dari berbagai Partai Politik yang berkuasa.

Selanjutnya, pada Masa Orde Baru sekitar tahun 1966 – 1998, intervensi politik terhadap birokrasi semakin kuat. Yang dimana pegawai negeri diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat. ASN diwajibkan mendukung Golongan Karya (Golkar), yang menjadi partai pemerintah. Hal ini menjadikan peran Birokrasi menjadi tidak netral dan sangat politis karena adanya intervensi dari pihak Partai Golkar pada saat itu. Pegawai negeri yang tidak menunjukkan loyalitas terhadap Golkar sering kali terkena sanksi administratif, seperti mutasi hingga pemecatan sebagai Pegawai Negeri.

Pada Masa Reformasi sekitar tahun 1998 – saat ini, reformasi birokrasi merupakan salah satu fokus utama pemerintahan pada saat itu. Hal ini menjadi alasan karena melihat kualitas dan situasi birokrasi pada Masa Orde Baru sangat tidak netral dan sering kali terlibat dalam proses politik. Sehingga, reformasi birokrasi merupakan langkah awal dalam menciptakan birokrasi yang netral dan profesional. Pada masa ini, ASN menjadi lebih netral dan profesional, sehingga ASN menjadi komponen penting dalam keberjalanan birokrasi terutama di Sukoharjo. Salah satu produk penting dalam berjalanya ASN yang Netral dan Profesional adalah terbentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN memiliki tugas sebagai badan pengawas para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

2.3 Jumlah ASN di Kabupaten Sukoharjo

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian penting dari sumber daya manusia yang mendukung kinerja pemerintahan daerah dalam melayani masyarakat. ASN di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari berbagai jabatan fungsional maupun struktural yang tersebar di berbagai dinas, badan, kantor, dan unit pelayanan publik. Berdasarkan data terbaru, jumlah ASN di Kabupaten Sukoharjo mencakup beberapa kelompok, antara lain pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Tabel 2.3: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Jabatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	Fungsional Tertentu	1.536	2.900	4.436
2.	Fungsional Umum	1.079	966	2.045
3.	Struktural	433	249	682
4.	Eselon V	-	-	-
5.	Eselon IV	307	215	522
6.	Eselon III	110	31	141
7.	Eselon II	16	3	19
8.	Eselon I	-	-	-
JUMLAH		3481	4364	7845

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sukoharjo tahun 2020

Di dalam tabel tersebut menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Sukoharjo berjumlah 7845 orang, meliputi Jabatan Fungsional Tertentu, Fungsional Umum, Struktural, Eselon IV, Eselon III dan Eselon II. Adapun kelas jabatan yang masih kosong dalam hal jumlah kedudukan yaitu pada Kelas Jabatan Eselon V serta Eselon I.

Penyebab tidak adanya kelas Jabatan Eselon V dikarenakan kebijakan struktural dalam birokrasi pemerintah yang menetapkan batas level hanya pada eselon tingkat IV. Sehingga sistem eselon ini diatur untuk menyederhanakan

hierarki jabatan dalam ASN. Sedangkan tidak adanya posisi pada kelas jabatan Eselon I karena struktur birokrasi dan organisasi pemerintahan daerah hanya memerlukan jabatan eselon hingga tingkat eselon II. Jabatan eselon I hanya ada di kementerian dan lembaga tingkat pusat, serta di pemerintah provinsi untuk fungsi-fungsi tertentu.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terus berupaya mengelola jumlah ASN sesuai kebutuhan, seiring dengan peningkatan kinerja pelayanan publik. Selain jumlah yang terukur, pemerintah juga memperhatikan kualitas dan kompetensi ASN melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kemampuan. Data dan kebijakan terkait jumlah ASN di Kabupaten Sukoharjo ini membantu pemerintah dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dan menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Alur Pilkada di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 merupakan agenda yang dilaksanakan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode 2021-2024. Pada Pilkada ini, sistem yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dilaksanakan secara langsung dan serentak. Pilkada ini diadakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Hal ini mengacu pada aturan yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan regulasi terkait Pilkada serentak di seluruh Indonesia.

Pilkada tahun 2020 diselenggarakan serentak dikarenakan pada saat itu seluruh wilayah Indonesia mengalami Pandemi Covid 19, sehingga pelaksanaan Pilkada pada tahun 2020 dilaksanakan dengan cara serentak dan dengan tetap

menerapkan protokol Covid 19. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020.

Dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020, KPU Kabupaten Sukoharjo menetapkan Etik Suryani – Agus Santosa dan Joko Santosa – Wiwaha Aji Santosa sebagai calon sah dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020. Pada kesempatan pemilihan nomor urut, pasangan calon Etik Suryani – Agus Santosa mendapatkan nomor urut 1 sedangkan Joko Santosa – Wiwaha Aji Santosa mendapatkan nomor urut 2. Kedua pasangan calon tersebut memiliki keunggulan dan visi misi masing masing dalam pertarungan Pilkada pada saat itu.

Tabel 2.4 : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati		Partai Pengusung
1			PDIP Golkar, Nasdem Demokrat
	<u>Etik Suryani</u>	<u>Agus Santosa</u>	

Sumber : Buku dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo “Sukoharjo Mengawasi Dimasa Pandemi” Catatan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 halaman 27-30.

Pasangan nomor urut 1 Etik Suryani – Agus Santosa mendeklarasikan diri pada hari Jumat, 4 September 2020 yang di adakan di rumah pribadi Etik Suryani di daerah Perumahan Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Pasangan Calon Bupati nomer urut 1 ini resmi di usung oleh 4 Partai Politik, yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, dan Demokrat dengan 27 kursi di Parlemen DPRD Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan suara pileg tahun 2019 lalu, Pasangan Calon nomor urut 1 mendapatkan sekitar 331 suara pada 4 partai politik tersebut.

Pasangan nomor urut 2 Joko Santosa – Wiwaha Aji Santosa mendeklarasikan diri pada hari Rabu, 26 Februari 2020. Deklarasi ini di inisiasi oleh salah satu partai pengusung dari pasangan calon nomor urut 2 yaitu Partai Gerindra. Selain itu Partai PKS juga resmi mengusung dan berkoalisi pada pasangan nomor urut 2 ini pada hari Kamis, 11 Juni 2020 yang digelar di Kantor DPD PKS Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, Partai PAN dan Partai PKB juga turut berkoalisi dan mendukung Pasangan nomor urut 2 Joko Santosa – Wiwaha Aji Santosa. Sehingga Calon ini resmi di usung oleh 4 Partai Politik, yaitu Gerindra, PAN, PKS, PKB dengan jumlah 18 kursi di Parlemen DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Selain 4 partai tersebut, terdapat partai lain yang juga turut mendukung Pasangan Calon nomor urut 2 yaitu, Berkarya, PBB, PPP, Perindo, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora). Namun 6 partai pendukung ini tidak memiliki kursi di Parlemen DPRD Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan suara pileg tahun 2019 lalu, Pasangan Calon no urut 2 mendapatkan sekitar 174 suara pada 4 partai politik tersebut.

Tabel 2.5 : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati		Partai Pengusung
2			Gerindra PAN PKS PKB
	Joko Santosa	Wiwaha Aji Santosa	

Sumber : Buku dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo “Sukoharjo Mengawasi Dimasa Pandemi” Catatan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 halaman 27-30.

Dalam pertarungan Pilkada pada kali ini keduanya memiliki visi misi dalam memengangkan Pilkada Kabupaten Sukoharjo. Visi misi tersebut saling di gaungkan ketika para calon Kepala Daerah melakukan kampanye di berbagai daerah di Sukoharjo. Pasangan nomor urut 1, Etik Suryanin – Agus Santosa memiliki visi “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur.” dan untuk misi pasangan ini memiliki 5 Misi yaitu,

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
3. Memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi.
4. Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan dan sosial.

Selanjutnya untuk pasangan nomor urut 2 yaitu Joko Santosa – Wiwaha Aji Santosa memiliki visi “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Mandiri Sejahtera dan Bahagia.” Dan untuk misi, pasangan ini memiliki 5 misi yaitu.

1. Kemandirian pemerintah dalam proses mengelola, merencanakan, dan menjalankan sistem pemerintahan yang berkualitas, profesional, mudah, terbuka, jujur, dan amanah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2. Kemandirian berpikir masyarakat melalui peningkatan kualitas intelektual, emosional, dan spiritual masyarakat yang sadar akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi masyarakat yang produktif, kreatif, dan mampu bersaing di level nasional dan internasional.
3. Mewujudkan masyarakat Sukoharjo yang sejahtera dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui pendampingan, pembinaan, dan pelatihan dalam menciptakan wirausahawan yang sukses secara sistematis dan terukur.
4. Menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan menciptakan lingkungan yang bersih, masyarakat yang sehat, yang siap bekerja sama dan sama kerja, serta bahu-membahu membantu sesama. Sehingga dapat mengurangi disparitas sosial.
5. Mewujudkan masyarakat yang bahagia melalui pembangunan infrastruktur dan utilitas daerah yang merata, kerjasama ekonomi, dan memelihara keamanan dan ketertiban umum, untuk mewujudkan Sukoharjo menjadi daerah yang ramah dan nyaman.

Keduanya memiliki sudut pandang masing-masing dalam merancang dan menyampaikan visi dan misi pada saat kampanye. Sehingga dalam pilkada tahun 2020 merupakan pertarungan yang sangat ketat antar dua pasangan calon ini.

Pada tahap kampanye, dilaksanakan pada tanggal 11 September – 5 Desember 2020 kurang lebih dilaksanakan dalam kurun waktu 2 bulan. Kampanye pada tahun 2020 menjadi sejarah baru, karena pada pelaksanaannya Kampanye memiliki tata aturan khusus karena adanya Covid-19. Protokol kesehatan menjadi aturan yang wajib dilaksanakan oleh para pasangan calon dalam menjalankan kampanye. Meskipun, pada saat kampanye terdapat pelanggaran protokol kesehatan seperti masa kampanye yang melebihi batas aturan, serta masa kampanye tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan tertib. Hal ini menjadi sebuah tantangan yang besar bagi kedua pasangan calon dalam melaksanakan kampanye.

Selanjutnya, pada tahap pengungkutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, telah sampai pada hasil suara yang telah terkumpul pada hari itu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo resmi merilis Hasil Perhitungan Suara, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 556/PL.02.6-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

Putusan ini disahkan dan dirilis pada tanggal 16 Desember 2020, yang dimana hasil suara menunjukkan bahwa Pasangan nomor urut 1, yaitu Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. - Drs. Agus Santosa unggul atas lawan politiknya. Dengan mendapatkan suara sebanyak 266.500 (Dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus) suara. Sedangkan Pasangan nomor urut 2, yaitu Joko Santosa, S.Pd., M.M.– H. Wiwaha Aji Santosa, S.Pd. mendapatkan suara sebanyak 233.180 (Dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan) suara. Berdasarkan perhitungan suara KPU Kabupaten

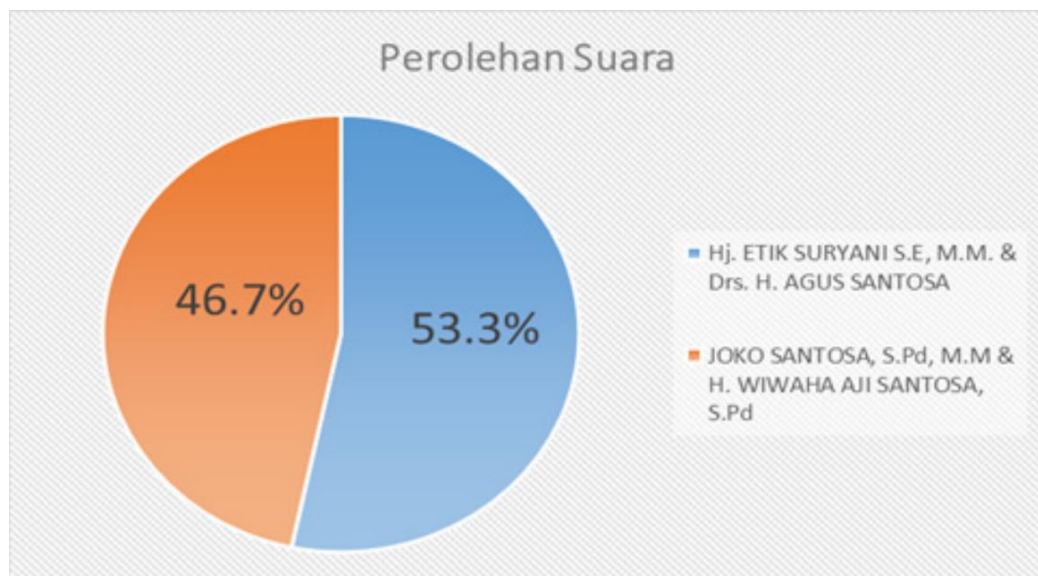
Sukoharjo, surat suara sah dalam pemilihan Bupati kali ini sebanyak 499.608 (Empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan) suara.

Tabel 2.6 : Hasil Akhir jumlah suara pada Pilkada Kabupaten Sukoharjo 2020

No.	Uraian	Jumlah Suara
1.	Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. Drs. Agus Santosa	266.500 Presentase 53.3%
2.	Joko Santosa, S.Pd., M.M.– H. Wiwaha Aji Santosa, S.Pd.	233.108 Presentase 46.7%
	Jumlah Suara Sah	499.608
	Jumlah Suara Tidak Sah	20.727
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	520.335

Sumber : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 556/PL.02.6-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

Gambar 2.2 : Diagram Presentase Perolehan Suara Pilkada 2020



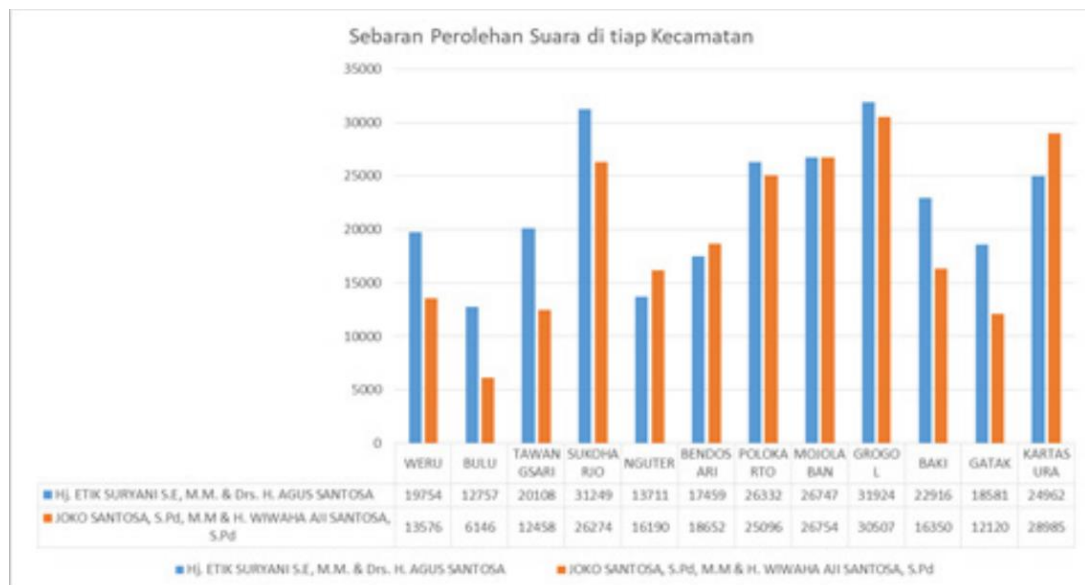
Sumber : Catatan Pengawasan Pilkada Sukoharjo 2020 oleh Bawaslu dalam buku Sukoharjo Mengawasi di Masa Pandemi

Tabel diatas menunjukan bahwa Pasangan Nomor Urut 1 yaitu Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. - Drs. Agus Santosa unggul (53.3%) atas yaitu Joko Santosa, S.Pd., M.M.– H. Wiwaha Aji Santosa, S.Pd. (46.7%) Dengan perolehan suara.

Perolehan suara ini memiliki selisih sebesar 33.320 suara, dengan total suara sah yaitu 499.608.

Hasil suara tersebut merupakan hasil final yang dirilis oleh KPU Kabupaten Sukoharjo melalui surat putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 556/PL.02.6-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

Gambar 2.3 : Diagram Sebaran Perolehan Suara tiap Kecamatan



Sumber : Catatan Pengawasan Pilkada Sukoharjo 2020 oleh Bawaslu dalam buku Sukoharjo Mengawasi di Masa Pandemi.

Gambar di atas merupakan sebaran perolehan suara di tiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Nomor urut 1 unggul di 8 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada, yaitu Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Grogol, Kecamatan Baki dan Kecamatan Gatak. Sedangkan Nomor urut 2 unggul di 4 kecamatan dari 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Kartasura.

Penyumbang suara terbanyak terdapat pada Kecamatan Grogol dengan total suara 62.431 suara, yang disusul oleh Kecamatan Sukoharjo dengan total 57.532 suara. Sedangkan kecamatan dengan suara terkecil terdapat pada Kecamatan Bulu dengan total 18.903 suara. Terdapat 3 Kecamatan yang dinilai sengit dalam jumlah suara yang diperoleh antar dua pasangan calon ini, Yaitu Kecamatan Grogol dengan selisih 1.417 suara, Kecamatan Bendosari dengan selisih 1.193 suara dan Kecamatan Mojolaban dengan selisih hanya 7 suara.